



**LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI PENCAPAIAN
RENCANA AKSI DPMD
SEMESTER I TAHUN 2019**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jl. Bhayangkara KM.1 - Kabupaten Sukabumi**



BAB I. PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

- Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai
- Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target
- Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek
- Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
- Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek
- Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi
- Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

1. Melekat pada tugas dan fungsi
2. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL, meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
3. Hal yang sama untuk Gubernur terhadap pelaksanaan dekon dan TP, serta Bupati/Walikota untuk pelaksanaan TP.

4. Dilakukan melalui: Pemantauan dan Pengawasan.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan: Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada;
2. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Evaluasi memberikan informasi mengenai: Benar atau tidaknya strategi yang dipakai

- Ketetapan cara operasi yang dipilih
- Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik
- Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program
- Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya, adalah: Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;

1. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
2. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.
 - Pelaksana: masing-masing Pengelola Kegiatan/Satker di daerah serta komponen pembina/penanggungjawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya.
 - Lingkup: aspek perencanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - Bentuk: Rapat Berkala, Rapat ad hock, Pelaporan, dan kunjungan lapangan
 - Dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Daerah: Gubernur dan Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan Dekon dan TP; Bupati/Walikota dan Ka. SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan TP, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - Komponen pemantuan meliputi: (1) perkembangan realisasi penyerapan dana, (2) realisasi pencapaian target keluaran (output), dan (3) kendala yang dihadapi & tinjuc.
 - Bentuk produk (akhir) laporan triwulan.

Metode Pelaporan dilakukan berkala dan berjenjang, maksudnya sebagai berikut: Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap 3 bulan (triwulanan), dan 6 bulanan (semesteran) atau tahunan.

1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, maksudnya penyampaian pelaporan dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, dan dari penanggungjawab program kepada pimpinan kementerian/lembaga; atau dari suatu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, hingga ke pusat. Fokus PP 39 tahun 2006 yaitu yang merupakan pengendalian dan evaluasi untuk kegiatan Pemerintah Pusat, yang merupakan dana Kementerian/Lembaga (pusat), dekonsentrasi (provinsi), dan tugas Pembantuan (kabupaten/kota), jadi tidak memfokuskan pada kegiatan daerah yang dibiayai dana desentralisasi . Adapun pengendalian dan evaluasi menurut UU No. 25/2004 Tentang SPPN, Pasal 28: Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi. Selama kurun waktu Tahun 2019, kegiatan yang dilaksanakan DPMD Kabupaten Sukabumi terdiri dari 54 kegiatan yang terdiri atas 12 kegiatan pada sekretariat dengan rincian : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 1 kegiatan; Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6 kegiatan; Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 2 kegiatan. Adapun kegiatan teknis terdiri dari 42 kegiatan yang tersebar di 4 bidang dengan sasaran kegiatan terdiri dari : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 10 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa 19 Kegiatan dan Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9 kegiatan, Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan 4 kegiatan. Target dan reasisasi kinerja DPMD seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| No. | Indikator kinerja | satuan | 2019 | | | Target akhir Renstra | Capaian Realisasi Kinerja |
|-----|---|--------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi % | Target akhir renstra (2021) | Capaian Realisasi kinerja |
| 1. | Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi dalam Pembangunan | % | 200 orang / 52,49 % | 200 orang | 100 % | 1.200 Kelompok | Tercapai |
| 2. | Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi | % | 1 Kelompok | Kelompok | 100% | 6 Kelompok | Dalam proses |
| 3. | Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih | % | 250 orang | 820 orang | 100% | 1250 Orang | Tercapai |
| 4. | Persentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang Statusnya Meningkat | % | 2 Desa | Desa | 100% | 12 | Dalam proses |

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja didapatkan bahwa Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sukabumi dengan realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II. HASIL MONITORING EVALUASI SEMESTER 1

2.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa diwujudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih cepat, lebih dekat dan lebih tepat, sehingga mempertipis rentang kendali dari pemerintah tingkat kabupaten ke tingkat yang lebih bawah. Anggaran belanja

langsung yang disediakan sebesar Rp. 7.820.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.419.100,- atau 30,70%. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa yaitu dari target 250 orang terealisasi 820 orang.

Adapun Penjelasan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Bimtek Aparatur Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya Pengetahuan Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Target Kinerja 80 orang Kaur Keuangan Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.356.000,- atau 99,28% dari anggaran Rp. 90.000.000,-

a. *Output* kegiatan :

- Jumlah Peserta Bimtek Aparatur pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan keuangan Desa sebanyak 80 Orang Kaur Keuangan Desa

b. *Outcome* kegiatan :

- Perangkat Desa dapat memahami tata kelola keuangan Desa, 21%

2. Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pengetahuan Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan manajemen pemerintahan Desa, target kinerja 200 orang Sekretaris Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 497.228.600,- atau 99,45% dari anggaran Rp. 500.000.000,-.

c. *Output* kegiatan :

- Jumlah peserta bimtek Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa sebanyak 200 Orang Sekretaris Desa

d. *Outcome* kegiatan :

- Meningkatkan kemampuan Sekretaris Desa dalam mengelola manajemen pemerintahan Desa, 72%

3. Bimtek Administrasi Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pengetahuan Kaur perencanaan Desa dalam melaksanakan administrasi Desa target kinerja 180 orang Kaur Perencanaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 330.022.000,- atau 78,58% dari anggaran Rp 420.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Bimtek administrasi Desa Sebanyak 180 orang Kaur Perencanaan

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kaur perencanaan Desa dalam melaksanakan administrasi Desa, 62%

4. Bimbingan Teknis BPD

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya kemampuan dan pengetahuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan Desa, target kinerja 240 orang BPD yang habis masa jabatannya dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 298.896.000,- atau 99,63% dari anggaran Rp 300.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Bimtek Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Sebanyak 240 orang.

Outcome kegiatan :

- meningkatkan kemampuan dan pengetahuan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan Desa, 11%

5. Profil Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator tersedianya data Profil Desa target kinerja 118 Kasi Pemerintahan Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 188.170.000,- atau 94,09% dari jumlah anggaran sebesar Rp 200.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Desa yang mengikuti diseminasi profil Desa sebanyak 118 Desa

Outcome kegiatan :

- Tersedianya data Profil Desa, 41 %

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator Peraturan Bupati yang disusun tentang Penataan Desa target kinerja 1 dokumen Perbup dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- atau 100% dari jumlah anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Peraturan Bupati yang disusun sebanyak 1 Perbup

Outcome kegiatan :

- Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan Desa, 40%

7. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator terpilihnya Kepala Desa Definitif hasil Pilkades serentak gelombang ke III Tahun 2019, target kinerja 240 Desa di 47 Kecamatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 495.889.000,- atau 9,61% dari jumlah anggaran sebesar Rp 5.160.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sebanyak 240 Desa di 47 Kecamatan

Outcome kegiatan :

- Terpilihnya Kepala Desa Definitif hasil Pilkades serentak , 100%

8. Lomba Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator tersedianya Desa juara tingkat Kabupaten Sukabumi hasil lomba Desa, target kinerja 381 Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 58.578.000,- atau 29,29% dari jumlah anggaran sebesar Rp 200.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa sebanyak 381 Desa

Outcome kegiatan :

- Tersedianya Desa Juara Lomba Desa Tingkat kabupaten Sukabumi, 80%

9. Pendataan Asset Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman Peserta tentang Input Data asset Desa, target kinerja 381 orang perangkat Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 73.400.000,- atau 97,87% dari jumlah anggaran sebesar Rp 75.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti diseminasi Input Data Asset Desa sebanyak 381 orang

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman peserta tentang Input Data Asset Desa,100%

10. Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman peserta dalam melaksanakan dukungan Penatausahaan Keuangan Desa, target kinerja 50 Orang operator SISKEUDES dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 9.530.000,- atau 31,33% dari jumlah anggaran sebesar Rp 30.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti diseminasi Input Data Asset Desa sebanyak 381 orang

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman peserta tentang Input Data Asset Desa,100%

11. Dukungan Manajemen Bale Sawala Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi sistem keuangan Desa, target kinerja 381 orang Sekretaris dan Bendahara Desa dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 27.162.500,- atau 54,33% dari jumlah anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Desa yang mengikuti Rekonsiliasi APBDesa Sebanyak sebanyak 381 desa

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pengelolaan Keuangan Desa berbasisi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, 33 %

12. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan Keuangan Desa menggunakan apalikasi SISKEUDES, target kinerja 60 Orang operator SISKEUDES dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 68.817.000,- atau 98,31% dari jumlah anggaran sebesar Rp 70.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Desa yang lemah pengelolaan SISKEUDESnya sebanyak 60 orang operator SISKEUDES

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan keuangan Desa menggunakan aplikasi SISKEUDES,50%

13. Bimtek Perencanaan Keuangan dan Asset Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta dalam menginput data perencanaan penganggaran dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0, target kinerja 120 Orang operator SISKEUDES dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 163.640.000,- atau 99,18% dari jumlah anggaran sebesar Rp 165.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah perangkat Desa yang dilatih input data perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SISKEUDES versi 2.0 sebanyak 120 orang operator SISKEUDES

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menginput data perencanaan penganggaran dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0,31%

14. Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman peserta tentang mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa target kinerja sebanyak 180 orang dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.730.000,- atau 49,73% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Peserta Diseminasi Penyusunan Laporan APBDesa dan deminasi pendamping Desa Sebanyak 180 orang

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Peserta dalam Penyusunan Laporan pertanggungjawaban APBDesa dan deminasi pendamping Desa, 16%

2.2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan diwujudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan . Anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. 745.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 383.302.000,- atau 51,45%. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan yaitu sangat tinggi, dari target 200 kelompok/orang terealisasi sebanyak 200.

Adapun Penjelasan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan sebagai berikut :

1. Bimtek Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator peningkatan kompetensi peserta Bimtek manajemen Badan Usaha Milik Desa dengan target kinerja sebanyak 70 orang dan penyerapan anggaran sebesar Rp 149.570.000,- atau 99,71% dari anggaran sebesar Rp 150.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Bimtek Manajemen Bumdes, dengan jumlah peserta 70 orang

Outcome kegiatan :

- meningkatkan kompetensi manajemen pengelola Bumdes 100%

2. Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator meningkatnya pemahaman pelaku UMKM di Pedesaan dengan target kinerja 90 orang dan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.900.000,- atau 91,80% dari anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Diseminasi peningkatan permodalan bagi UMKM di Pedesaan sebanyak 90 orang

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Pedesaan, 100%

3. Peningkatan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator meningkatnya pemahaman pelaku UMKM untuk melaksanakan kerjasama kemitraan dengan swasta dengan target kinerja 90 orang dan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.460.000,- atau 90,92% dari anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Diseminasi peningkatan kemitraan swasta dan UMKM di Pedesaan sebanyak 90 orang

Outcome kegiatan :

- Menciptakan pemahaman pelaku UMKM untuk melaksanakan kerjasama kemitraan dengan swasta, 100%

4. Pembentukan kelembagaan pos pelayanan teknologi (POSYANTEK)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator kinerja meningkatnya informasi dan keberdayaan masyarakat melalui posyantek di tingkat Kecamatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 73.049.500,- atau 97,40%

dari anggaran Rp 75.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta Diseminasi Permendesa sebanyak 70 orang

Outcome kegiatan :

- Terwujudnya Peningkatan Informasi dan Keberdayaan masyarakat melalui POS pelayanan Teknologi (posyantek) di Tingkat Kecamatan.

5. Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator kinerja meningkatkan pemasaran produksi kelompok usaha kecil pedesaan dengan target kinerja 2 pengrajin/inovator dan penyerapan anggaran sebesar Rp 8.500.000,- atau 6,80% dari anggaran Rp 125.000.000,-

Output kegiatan :

- Terfasilitasinya kelompok masyarakat, terikutinya promosi TTG pada gelar TTG tingkat Nasional, terlaksananya pameran TTG tingkat Provinsi sebanyak 2 pengrajin/inovator, 8 orang/1keg

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemasaran produk kelompok usaha kecil pedesaan melalui pameran TTG tingkat Provinsi dan tingkat Nasional

6. Pengembangan Kawasan Pedesaan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator terbentuknya kawasan Perdesaan dan pengembangan kawasan Perdesaan dengan target kinerja 6 orang/9 Desa/1 Kecamatan,3 orang/9desa/1kecamatan dan penyerapan anggaran sebesar Rp 11.218.500,- atau 22,44% dari anggaran sebesar Rp 125.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Peserta FGD Kawasan Perdesaan 6 Orang/9 Desa/1 Kec, Sosialisasi Kawasan Perdesaan 3 Orang/9Desa/1 Keg.

Outcome kegiatan :

- terbentuknya pengembangan kawasan perdesaan dan terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan sebesar 85%.

7. Dukungan Manajemen Kerja Sama Antar Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator kinerja Jumlah peserta sosialisasi kerjasama antara desa dalam perencanaan pengembangan kawasan perdesaan dengan target kinerja 47 Kecamatan/94 orang dan penyerapan anggaran sebesar Rp 49.604.000,- atau 99,21% dari anggaran Rp 50.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta sosialisasi kerja sama antar desa dalam perencanaan pengembangan kawasan perdesaan sebanyak 47 Kecamatan/49 orang.

Outcome kegiatan :

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta dalam kebijakan program kerjasama antar desa 80%

2.3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan diwujudkan untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Ada 2 Sasaran strategis program ini yaitu 1. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan indicator persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat, 2. Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public dengan indicator kinerja persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi. Anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. 925.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 266.367.950,- atau 28,80%. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah desa sangat tertinggal yang statusnya meningkat yaitu target 2 desa sampai bulan Juni belum terealisasi, dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa, dari target kinerja 1 kelompok sampai bulan juni belum terealisasi.

Adapun Penjelasan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatnya akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, menciptakan pembangunan yang inklusif dengan target kinerja 5 Kecamatan/9 Desa dan penyerapan anggaran sebesar Rp 28.575.700,- atau 28,80% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Peserta diseminasi pemberdayaan desa-desa tertinggal, Monev Desa-Desa Tertinggal sebanyak 15 Orang/9 Desa/2Kec, 5Kec/9 Desa

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sebesar 80 %

2. Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya pemahaman peserta tentang Input Data OMSPAN dengan target kinerja 381 perangkat Desa dan penyerapan anggaran sebesar Rp 78.425.000,- atau 78,43% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah Peserta Input data OMSPAN sebanyak 381 perangkat Desa

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman peserta tentang input data OMSPAN, sebesar 85 %

3. Dukungan Manajemen Partisipatif

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator terjalin kemitraan antara Pemerintah dengan DBM UPK dengan target kinerja 41 orang/1 hari,20 orang/1 hari, 82 orang/2 hari dan penyerapan anggaran sebesar Rp 14.868.750,- atau 8,50% dari anggaran sebesar Rp 250.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta diseminasi tim verifikasi SPP, FGD pengembangan kelembagaan pengelolaan DBM, workshop evaluasi DBM SPP sebanyak 41 orang/1 hari,20 orang/1 hari, 82 orang/2 hari

Outcome kegiatan :

- Terfasilitasinya tahapan kegiatan Dukungan Manajemen Partisipatif, terjalin kemitraan antara pemerintah dengan DBM UPK sebesar 75 %

4. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator meningkatnya koordinasi dan kinerja pokjnal Posyandu Desa/kel dalam mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan Posyandu dengan target kinerja 20 orang/4 Kec,45 orang/1hari,20 orang/1hari,100 orang/1hari,10 orang/3hari dan penyerapan anggaran sebesar Rp 39.020.500,- atau 39,02% dari anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah binaan Posyandu Tk. Kabupaten,binaan P2WKSS,binaan 10 program

pokok PKK&KB-KES,Finalisasi Posyandu/Rechecking Posyandu Tk. Provinsi, Lomba Posyandu Tk. Provinsi sebanyak 20 orang/4 Kec,45 orang/1hari,20 orang/1hari,100 orang/1hari,10 orang/3hari

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan koordinasi dan kinerja Pokjanal Posyandu Desa/Kel dalam mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan Posyandu sebesar 60 %

5. Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting dengan target kinerja 16 orang/5kali,376 orang/14 hari dan penyerapan anggaran sebesar Rp 105.478.000,- atau 63,93% dari anggaran sebesar Rp 165.000.000,-

Output kegiatan :

- Jumlah peserta workshop pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam pencegahan stunting, rapat koordinasi kabupaten sebanyak 376 orang/14 hari, 16 orang/5 kali.

Outcome kegiatan :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pencegahan stunting sebesar 80 %

2.3.1 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran sampai dengan akhir juni tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Sukabumi, dengan rincian : Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.818.264.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.653.537.054,- (45,61%) sehingga didapat efisiensi sebesar Rp. 3.164.727.156,-. Sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.335.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.604.429.447,- (37,33%) sehingga didapat efisiensi sebesar Rp. 7.730.770.553,-.

2.4 Permasalahan dan Strategi Pemecahan masalah

Meskipun nilai akhir berdasarkan aspek kualitas terhadap kinerja DPMD termasuk pada kategori kualifikasi baik, namun ada beberapa kegiatan yang harus mendapat perlakuan khusus dan strategi khusus untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi DPMD Kabupaten Sukabumi antara lain :

- Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa;
- Informasi regulasi peraturan perundang-undangan terbaru dari Pemerintah pusat yang lambat di terima oleh Pemerintah Daerah;
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengukuran Batas Desa;
- Kurangnya keakuratan batas-batas Desa di Kabupaten Sukabumi;
- Lambatnya pengisian skor perkembangan tingkat desa yang diberikan oleh Kecamatan yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan Lomba Desa.
- Masih banyak desa yang belum memahami penyusunan APB Desa yang benar.
- Masih rendahnya pemahaman desa dalam memanfaatkan Sistem Keuangan Desa.

2.4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut, DPMD Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan beberapa upaya, diantaranya :

- Merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa
- Memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang sistem online prodeskel
- Mendatangkan tenaga pendamping sistem online Prodeskel
- Memberikan surat DPMD untuk segera mengisi skor Perkembangan Tingkat Desa
- Memberikan Surat Bupati untuk segera mengisi Skor Perkembangan Tingkat Desa.
- Memberikan pembinaan terhadap desa-desa agar penyusunan APB Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Permendes Tahun 2016.
- Memberikan Pembinaan kepada Desa agar lebih memahami tentang sistem Keuangan

2.4.3 Prestasi dan Kerjasama

Selama kurun waktu Tahun 2019, ada beberapa prestasi yang di peroleh dan Kerjasama yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sukabumi, diantaranya :

1. DPMD Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2019 telah selesai melaksanakan kegiatan pemilihan kepala Desa serentak sebanyak 240 Desa di 47 Kecamatan, kegiatan Pilkades serentak Tahun 2019 merupakan pelaksanaan pilkades serentak gelombang ke III.
2. DPMD bekerja sama dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sukabumi untuk mensosialisasikan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Sukabumi.
3. DPMD bekerja sama dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sukabumi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk survey Penetapan dan penegasan Batasa Desa di Kabupaten Sukabumi.
4. Juara ke 3 lomba posyandu terbaik Tk. Provinsi Jawa Barat yaitu posyandu kemiri 1 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit;

5. Penghargaan pembina Posyandu terbaik Tk. Provinsi Jawa Barat (Bupati Award)
6. Penghargaan kepada Bupati Sukabumi dari Deputi Kemenko PMK mengenai interkoneksi Siskeudes dengan Ompspan serta penyerahan aplikasi Siskeudes.

III. Penutup

Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dimulai dari proses pengambilan kebijakan, implementasi, dan monev atas pelaksanaan pembangunan. Perkembangan teknologi informasi memberi ruang publik yang lebih luas untuk monev partisipatif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel. DPMD telah memulai memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam monev pelaksanaan program pembangunan melalui sistem informasi yang disediakan Pemda. Namun demikian tingkat derajat partisipasi dalam monev tersebut perlu ditingkatkan dengan membuka ruang komunikasi publik untuk memperoleh *feed back* sehingga pelaksanaan program pembangunan semakin berkualitas. Untuk mencapai hal demikian, perlu kesiapan baik pemerintah maupun masyarakat dan Pemerintah daerah perlu memperbaiki baik itu menyangkut sistem informasi yang telah dibangun, kualitas data dan informasi yang disajikan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi secara positif dalam implementasi program pembangunan.